



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DICKY MOCH RIZAL
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN FISIOLOGI
3. NHK : 804066

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.702.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.125 m²/231 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m²/125 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah Seluas 530 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m²/60 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
5. Bangunan Seluas 38 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m²/90 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah Seluas 156 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 702.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m²/80 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 601.500.000

1. MOTOR, SUZUKI TITAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



2.	MOBIL, HYUNDAI Creta Creta Prime Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 300.000.000
3.	MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 150.000.000
4.	MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp. 150.000.000
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 130.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. 50.000.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 3.174.957.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ----
Sub Total		Rp. 15.658.457.000
III. HUTANG		Rp. 1.360.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 14.298.457.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.